

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAN RASIO
EFEKTIVITAS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**(Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode
2013-2017)**



SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Irfan Hanif

14312384

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAN RASIO
EFEKTIVITAS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

(Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII.

Oleh :

Muhammad Irfan Hanif

14312384

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Pemlis,



(Muhammad Infan Hanif)

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAN RASIO
EFEKTIVITAS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

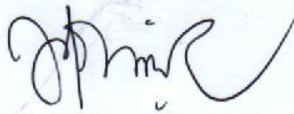
Nama : Muhammad Irfan Hanif

No. Mahasiswa : 14312384

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal...12-2-2019

Dosen Pembimbing,



Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAN RASIO EFEKTIVITAS TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

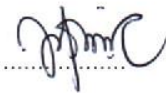
Disusun Oleh : **MUHAMMAD IRFAN HANIF**

Nomor Mahasiswa : **14312384**

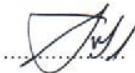
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 13 Maret 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.



Penguji : Suwaldiman, SE., M.Accy., Ak., CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.”

(Q.S Al Baqarah :153)

“Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang sabar.”

(QS Al Baqarah:155)

“Tuhan tidak mewajibkan kita menang, sehingga kalahpun bukan dosa, yang
terpenting adalah berjuang atau tidak.”

(Emha Ainun Najib)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan)
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS Al-Insyirah: 5-8)

KATA PENGANTAR



Assalamu'aliakum Wr. Wb.

Dengan menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah .Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia akal sehat serta pikiran, kekuatan dan kasih sayang atas segala kemudahan-Nya selama proses penyusunan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap terlantun.
3. Kedua orang tua, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Bapak Johan Arifin S.E.,M.Si.,Ph.D.,CFrA selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktunya meski sesibuk apapun dalam memberikan ilmu, nasihat serta pengarahan dengan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang diberikan ini selalu bermanfaat.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya.

6. Semua teman-teman kampus maupun luar kampus yang selama ini meluangkan waktunya untuk mendengarkan semua keluhan kesah selama menyusun skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
8. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas doa dan dukungan yang ada selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Penulis,

(Muhammad Irfan Hanif)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (<i>Fiscal Federalism</i>).....	11
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	12
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Hipotesis Penelitian	35
2.4 Kerangka Konseptual	43
BAB III	44
METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Populasi dan Sampel	44
3.3 Sumber Data dan Pengumpulan Data.....	45

3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.4.1	Variabel Independen	46
3.4.2	Variabel Dependen.....	48
3.4.3	Variabel <i>Intervening</i>	49
3.5	Metode Analisis Data	50
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	50
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	50
3.5.3	Uji Hipotesis	52
BAB IV		55
HASIL DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	55
4.2	Hasil Analisis Data	56
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	56
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	59
4.2.3	Uji Hipotesis	62
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
BAB V		81
PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		87
LAMPIRAN 1		88
LAMPIRAN 2		105
LAMPIRAN 3		106
LAMPIRAN 4		107
LAMPIRAN 5		108
LAMPIRAN 6		109
LAMPIRAN 7		110
LAMPIRAN 8		111

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website BPS. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 175 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi jalur dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian

ABSTRACT

The purposes of this research are to analyze the influence of independently ratio and effectiveness ratio on human development index with economic growth as the intervening variable. The type of data collected was secondary data which obtained from BPS website. The sampling technique is a purposive sampling method which result for 175 city/region in Central Java Province .The analytical methods used in this study were descriptive stastical analysis, linier regression analysis, and sobel test. The result of this research shows that the variable of independently ratio and effectiveness ratio has positive influence towards economic growth; Economic growth has positive influence towards human development index (HDI); Independently ratio and effectiveness ratio has positive influence towards human development index (HDI) with economic growth as the intervening variable.

Keywords:, Human Development Index (HDI), Economic Growth, Effectiveness Ratio, Independently Ratio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala aktivitas di daerah mulai dari penggalian sumber daya alam yang harus dikembangkan agar menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarannya. Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk deregulasi baru. Dengan adanya perubahan kebijakan tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan akan terjadinya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta juga mengimplementasikan kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Cara kerja pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi yaitu dengan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih tepat dan berdaya guna karena pemerintah kota/kabupaten lebih mengetahui kondisi kebutuhan serta pembangunan daerah, anggaran didalam APBD yang terbagi menjadi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan suatu tantangan yang harus dijalankan oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerahnya masing-masing dengan baik. Dalam hal pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Rahmawati, 2010).

Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah berjalan sejak kurang lebih sepuluh tahun, akan tetapi tujuan utama dari Otonomi Daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dimana hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Menurut (Mardiasmo, 2011) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Dengan begitu akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain tuntutan atas akuntabilitas publik, berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah. Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberikan suatu mandat atau perintah berupa tugas-tugas yang harus dilaksanakan yang salah satunya yang ada pada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang menjadi pemerintah. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Sukirno, 2011). Di dalam teori *fiscal federalisme* disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah yang mana desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan dalam mengambil keputusan kepada pemerintah pada tingkat yang rendah. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam suatu negara tidak hanya didukung oleh

kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Pembangunan manusia ini dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa aspek yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Berdasarkan beberapa aspek tersebut, UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam Publikasi BPS telah menetapkan standar pengukuran pembangunan sumber daya manusia yang dituangkan ke dalam *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan pesat dalam lima tahun terakhir atau sejak 2012. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bisa dikatakan lebih cepat dibandingkan nasional yang tumbuh stabil di kisaran 5%. Pada triwulan III 2017, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mencapai angka 5,13%. Kondisi ini lebih baik dibanding periode yang sama pada 2016 yang hanya 5,06%. Dalam kondisi ini tersirat bahwa pertumbuhan ekonomi telah sejalan dengan peningkatan IPM di Jawa Tengah yang mana BPS mencatat IPM Jawa Tengah pada tahun 2017

mengalami kemajuan dari status “sedang” menjadi “tinggi”. Hal itu terlihat dari IPM pada tahun 2017 yang mencapai 70,52 dibandingkan 2016 yang hanya 69,98. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam kinerja yang baik ini adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Tantangan lain yang harus diatasi juga yaitu dengan mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satu penelitian terdahulu (Yuana, 2014) menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan peneliti terdahulu, penelitian ini menambahkan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memediasi antara variabel independen yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Seperti pada penelitian (Berliani, 2016) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sendiri diikuti dengan pengurangan

kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan pekerjaan. Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk atau masyarakat dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tidak hanya berbeda dalam menambahkan variabel, penelitian ini juga berbeda dalam pengambilan sampel yaitu pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dapat di lihat jika IPM di daerah tersebut tinggi, maka peneliti akan meneliti hal-hal yang dapat mempengaruhi IPM tersebut dengan mengukur pada kemandirian ataupun keefektifan daerah tersebut dalam mengelola daerahnya masing-masing.

Dari uraian di atas, maka di lakukan suatu penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah rasio kemandirian berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah rasio efektivitas berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah rasio kemandirian berpengaruh pada indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas berpengaruh pada indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui informasi mengenai :

1. Pengaruh berupa rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengaruh berupa rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengaruh rasio kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaruh rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka diharapkan akan mempunyai manfaat yang di antaranya yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya masalah kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dan pembahasan selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori federalisme fiskal, kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis data, hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian serta analisis hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemerintahan federalisme fiskal adalah sebuah struktur dari tingkatan pemerintah pemerintah yang masing-masing tingkatan mempunyai sumber dari pendapatan dan mempunyai tanggung jawab. Jadi federalisme fiskal sendiri merupakan sebuah perangkat prinsip pedoman yang diterapkan di sebuah negara ataupun daerah untuk merancang keuangan tingkat nasional dan subnasional pemerintah. Dalam konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pada pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di dalam beberapa negara bagian yang berbentuk federal di mana pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetya, 2013).

Dalam model federalisme fiskal pemerintah pusat dapat secara sepihak menentukan dan mengubah baik tanggung jawab pengeluaran maupun pendapatan pemerintah daerah dan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintahan dalam upaya mengatasi permasalahan. Implikasi dari

hubungan fiskal dari model federalisme fiskal ini adalah dengan berbagai bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menggalakan ekonomi regional dan infrastruktur lokal. Biasanya akan dibelanjakan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman dan sektor-sektor yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Hubungan teori federalism fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia maka diharapkan agar mampu untuk membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera. Teori Federalisme Fiskal (*fiscal federalism*) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Shah dan Thompson, 2002).

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas yang terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan suatu pekerjaan (Kasmir, 2012). Kinerja merupakan suatu pencapaian atas apa yang telah direncanakan. Apabila dalam pencapaiannya melebihi dari yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja tersebut baik. Tetapi jika pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan maka akan dikatakan

tidak baik. Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi. Sedangkan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu. Hal tersebut merupakan kemampuan dalam suatu daerah untuk mengelola seluruh sumber-sumber keuangan asli daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

2.1.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang

dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses, atau suatu organisasi. Menurut (Mahmudi, 2011) secara umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan.

Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa tujuan pengukuran kinerja sektor publik antara lain :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksud untuk dapat membantu pemerintah fokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan.

Sedangkan berikut tujuan penilaian kinerja didalam sektor publik menurut (Deddi dan Ayuningtyas, 2011) :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Dalam menjalankan pemerintahan seperti pembangunan ataupun pelayanan masyarakat wajib untuk melapor pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan tugas yang diberikan secara baik atau tidak. Dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya terdapat suatu alat yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

2.1.2.3 Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja

yang akan datang. Ardi (2018) menyebutkan bahwa hasil analisis rasio keuangan digunakan untuk tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi keuangan daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.2.4 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Halim (2012) menyebutkan terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah, meliputi :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2011) :

$$Rasio Kemandirian = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan PP / Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar total PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim 2012). Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini :

$$Rasio Efektivitas = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2012). Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini (Kasmir, 2015) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%.

d. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan (Halim, 2012). Berikut perhitungan dengan persamaan sebagai berikut ini (Mahmudi, 2011) :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

Keterangan :

$PADt1 - PADt0$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

$PADt0$ = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

e. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012). Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut (Kasmir, 2015) :

1. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$RBR = \frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

$$RBM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang mana rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, dan juga sebaliknya. Sedangkan untuk rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, dan juga sebaliknya.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. Produk domestik bruto (Gross Domestic Product atau GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara.

Sukirno (1994) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan faktor non ekonomi antara lain sebagai berikut :

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang, sumber daya alam yang

tersedia seringkali terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan. Jika sumber daya alam tidak dipergunakan secara tepat, maka suatu negara tidak mungkin mengalami apa yang disebut dengan kemajuan.

2. Akumulasi modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional. Investasi di bidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi, tetapi juga dapat menaikkan kesempatan kerja.

3. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat komplemen bagi modal dan menaikkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, peranan swasta sangat penting. Sedangkan di negara berkembang, peranan pemerintah sangat besar dalam penyediaan sarana sosial.

4. Teknologi

Proses pertumbuhan ekonomi sangat penting didukung oleh kemajuan teknologi. Proses yang dimaksud berkaitan dengan perubahan yang mencakup metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau penelitian baru. Pertumbuhan teknologi dapat meningkatkan

produktivitas kerja, modal dan faktor produksi lain yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas. Kedua hal tersebut akan menggiring perekonomian ke arah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Luas pasar akan meningkat akibat dari perekonomian yang meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedianya sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar maka pembagian kerja dan spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingkatkan, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.4.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human

Development Report, 1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upayaupaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1) Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2) Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3) Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4) Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental

maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

2.1.4.2 Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran

pembangunan SDM secara sempurna. UNDP menyebutkan bahwa ada indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI sebagai berikut :

- a) *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- b) *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- c) *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

a. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data

dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP *adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

c. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada

kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Menurut (Todaro, 2006) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

1. Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
2. Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).
3. Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

2.1.4.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Algifari (2014) menjelaskan indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

- a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- c) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Keterangan :

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Indeks pendidikan

X3 = Indeks standar hidup layak

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Rangkuman Jurnal Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
(Yuana, 2014).	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012).	<p>Independen Kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas.</p> <p>Dependen Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional.</p>	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Secara langsung rasio kemandirian dan rasio efektivitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap ketimpangan regional tetapi untuk rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap ketimpangan regional, sehingga rasio efektivitas dihilangkan dengan menggunakan metode trimming.
(Syamsudin, Cahya, 2015).	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan.	<p>Independen Kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.</p>	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Rasio kemandirian secara langsung memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran. Secara tidak langsung

		Dependen Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran.		kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran, sedangkan untuk rasio efektivitas secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran.
(Harliyani & Haryadi, 2016).	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.	Independen Kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian belanja langsung, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Analisis regresi linier berganda	Rasio desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

(Berliani, 2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka.	<p>Independen Kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja.</p> <p>Dependen Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.</p>	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Kinerja Keuangan berpengaruh secara simultan dan berpengaruh positif secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.
(Amalia & Purbadharma, 2014)	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	<p>Independen Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja.</p>	Analisis regresi linier berganda	Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM, Secara parsial, kemandirian keuangan

		Dependen Indeks Pembangunan Manusia.		daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
(Maulana & Bowo, 2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011.	Independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi. Dependen Indeks Pembangunan Manusia.	Analisis Regresi (model fixed effect)	Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan manusia. Hubungan antara pendidikan dengan kualitas hidup adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi IPM. Namun, teknologi tidak berpengaruh signifikan.
(Astuti, 2015)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011)	Independen Kinerja Keuangan. Dependen Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan.	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Kemandirian merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Berdasarkan teori federalisme fiskal dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di negara ini maka diharapkan dari daerah tersebut mampu untuk membangun daerah menjadi lebih baik dengan sendirinya. Seperti yang di katakan (Halim, 2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik, diduga akan meningkatkan sehingga mendukung pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian (Yuana, 2014) dan (Saiful, 2011) menyatakan kemandirian daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan rasio tersebut memiliki peranan yang signifikan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Rasio kemandirian akan meningkatkan PAD yang tinggi pada daerah tersebut dan hal itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

H₁ : Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Pengaruh Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio efektivitas merupakan rasio derajat keberhasilan yang akan didapat dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Apabila daerah tersebut mampu untuk merealisasikan peningkatan PAD dengan pelayanan masyarakat yang optimal maka rasio efektivitas akan tinggi. Derajat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola anggaran maupun mengelola potensi yang terdapat di daerah tersebut dapat dikaitkan

dengan perkembangan perekonomian di daerah itu, semakin berhasil dalam mencapai target yang diinginkan atau semakin efektif, maka seharusnya perkembangan perekonomian akan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penelitian (Syamsudin, 2015) dan (Astuti, 2015) menyebutkan rasio efektivitas berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio efektivitas memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding dengan target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, dan sebaliknya.

H₂ : Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1995). Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan serta sejauhmana peran perempuan dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Jika semua itu sudah dapat di lakukan oleh pemerintah daerah maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Dalam peningkatan perekonomian juga akan mempengaruhi pembangunan manusia, ketika pendapatan atau PDB per kapita meningkat berarti pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan manusia menjadi naik.

Selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk, distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan pendapatan

menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan keuangan. Akibatnya mengurangi pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik (Ramirez et.al, 1998). Pengeluaran lebih banyak ditujukan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP, 1995). Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.

Penelitian (Maulana & Bowo, 2013) dan (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2014) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan manusia.

H₃ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia

2.3.4 Pengaruh Kemandirian terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah (Mahmudi, 2011). Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar keleluasaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ketersediaan bangunan/gedung sekolah yang layak, peralatan kesehatan secara lengkap yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan atau non makanan.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada daerah membuat pemerintah daerah dituntut untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Jika pemerintah dapat atau berhasil menjalankan pemerintahan daerahnya dengan baik maka akan berdampak pada laju perekonomian yang meningkat. Hal itu akan berlanjut dampaknya terhadap kualitas manusia atau masyarakat di daerah tersebut di mana indeks pembangunan manusia di daerah tersebut juga akan meningkat (Ardi, 2018).

Pada penelitian (Amalia & Purbadharmaja, 2014) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak pada indeks pembangunan manusia yang mana daerah tersebut akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan keuangannya sendiri sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

H₄ : Rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan di mediasi oleh pertumbuhan ekonomi

2.3.5 Pengaruh Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu dapat melaksanakan tugas penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diterima tidak dikelola dengan baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bergantung pada nominal pendapatannya, namun juga tata cara pengelolaannya. Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi

penerimaan secara mandiri. Dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan (Saiful, 2011).

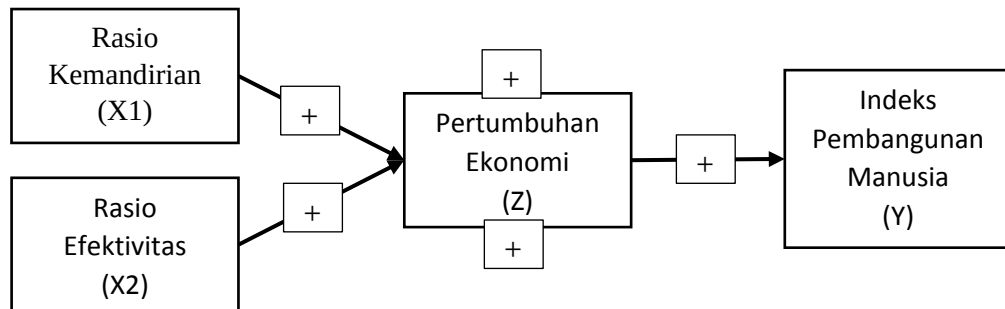
Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah daerah yang mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang mempengaruhi paritas daya beli masyarakat serta menjadi indikator IPM. Penelitian (Berliani, 2016) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam indikator kinerja keuangan tersebut diantaranya adalah rasio efektivitas keuangan daerah. Dimana rasio efektivitas memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada daerah dan itu akan berdampak pada kesejahteraan manusia atau masyarakat pada daerah tersebut.

H₅ : Rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan di mediasi oleh pertumbuhan ekonomi

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah disebutkan dan melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Iskandar, 2013) penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Desain penelitian ini menganalisis suatu variabel yang mempengaruhi (*independen*) yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang dipengaruhi (*dependen*) yaitu indeks pembangunan manusia dengan melalui variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pengujian data digunakan untuk dasar dalam menarik kesimpulan penelitian, menerima atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut (Iskandar, 2013) adalah wilayah generasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini merupakan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2013-2017 dengan jumlah 29 kabupaten dan 6 kota.

3.2.2 Sampel

Sampel menurut (Iskandar, 2013) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga dalam pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu dengan dasar pertimbangan yang telah tersedia. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu *sampling purposive* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2013-2017 secara lengkap.

3.3 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Data tersebut diperoleh melalui situs instansi-instansi terkait dan juga hasil studi perpustakaan pada Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut (Sugiyono, 2012) menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan ditarik kesimpulannya. Peneliti akan melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian, setelah itu akan melakukan analisis untuk mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian dan rasio efektivitas.

3.4.1.1 Rasio Kemandirian (X_1)

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahnya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD memegang peranan penting maka diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dari seluruh penerimaan daerah dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah kabupaten, karena faktor penting dalam kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio kemandirian :

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Bantuan\ PP\ / \ Provinsi\ dan\ Pinjaman} \times 100\%$$

Tabel 3.1 : Kriteria Rasio Kemandirian

Persentase PAD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 100	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : *Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM*

3.4.1.2 Rasio Efektivitas (X₂)

Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan pemerintah kabupaten dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio kemandirian :

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 3.2 : Kriteria Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 - 100
Cukup Efektif	> 80 - 90
Kurang Efektif	> 60 - 80
Tidak Efektif	< 60

Sumber : *Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996.*

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia.

3.4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau disebut juga dengan *Human Development Index* (HDI). IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data IPM adalah dalam persen. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin baik. Menurut Algifari (2014) rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Keterangan :

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Indeks pendidikan

X3 = Indeks standar hidup layak

3.4.3 Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* atau biasa disebut dengan variabel antara merupakan variabel yang dapat memediasi hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel antara ini berada diantara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen.

3.4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi (Z)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Jawa Tengah atau disebut juga dengan laju pertumbuhan ekonomi. Formula dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu :

$$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}}$$

Keterangan :

Y_{rt} : Produk Domestik Regional Bruto riil tahun t

Y_{rt-1} : Produk Domestik Regional Bruto riil tahun sebelumnya

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan serta memberikan gambaran maupun informasi terkait deskriptif penelitian. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yang menginformasikan tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*) dan standar deviasi (*standard deviation*).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui dan menguji sebagaimana kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam suatu penelitian. Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan 3 jenis uji yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui hasil dari uji ini maka dilakukan uji *kolmogorov smirnov* dalam program spss dengan kriteria $\alpha = 0.05$ dimana jika signifikan > 0.05 maka variabel terdistribusi normal dan jika < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam uji ini untuk melihat hasilnya melalui *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) yang mana batas ukuran yaitu *tolerance value* adalah 0.1 dan VIF adalah 10. Jika *tolerance value* ≥ 0.10 atau $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi gejala multikolonieritas (Ghozali, 2013).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika variabel independen secara statistik menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya > 0.05 , maka tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2013).

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier

Regresi linier merupakan alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut dengan variabel bebas atau independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat. Ada dua model dalam analisis regresi linier di penelitian ini yaitu model I dan model II.

a. Analisis Regresi Model I

Pada analisis regresi model I (satu) digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi model I (satu) persamaan strukturalnya sebagai berikut :

$$PE = \alpha + \beta_1 RKKD + \beta_2 REKD + e$$

Keterangan :

PE : Pertumbuhan Ekonomi

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Rasio Kemandirian

RK : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

β_2 : Koefisien Regresi Rasio Efektivitas

RE : Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

e : *Error*

b. Analisis Regresi Model II

Pada analisis regresi model II (dua) digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi model II (dua) persamaan strukturalnya sebagai berikut :

$$IPM = \alpha + \beta PE + e$$

Keterangan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi Pertumbuhan Ekonomi

PE : Pertumbuhan Ekonomi

e : *Error*

3.5.3.2 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh bagaimana pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam

menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2013). Jika hasil nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka H_0 gagal ditolak. Namun, jika signifikansi kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif yang digunakan.

3.5.3.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut (Ghozali, 2013) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) terletak diantara 0 dan 1, jika (R^2) semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen.

3.5.3.4 Uji Sobel

Penelitian ini menggunakan uji sobel untuk melihat kuat atau tidaknya variabel pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi variabel independen yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui hubungan tidak langsung yang disebabkan adanya variable intervening. Hasil uji sobel dapat diterima dan dikatakan signifikan jika nilai probabilitasnya kurang dari 0.05.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah rasio kemandirian dan rasio efektivitas memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Data pada penelitian ini diambil dari laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan asli daerah, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013-2017. Dalam penelitian ini populasi berasal dari kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 dengan jumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *purpose sampling* yaitu pemilihan sampel dengan menyesuaikan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 29 kabupaten dan 6 kota yang telah memenuhi kriteria sampel, sehingga jumlah data pada penelitian ini adalah 175 data (35 x 5 tahun). Berikut rincian pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Data Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten yang ada pada Provinsi Jawa Tengah	29
2.	Kota yang ada pada Provinsi Jawa Tengah	6
Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai sampel		35
Jumlah data yang digunakan sebagai sampel pada tahun 2013-2017 (35x5)		175

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan serta memberikan gambaran maupun informasi terkait deskriptif penelitian. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yang menginformasikan tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*) dan standar deviasi (*standard deviation*) dari jumlah keseluruhan data dalam periode 2013-2017 yang berjumlah 175 data. Berikut hasil dari uji analisis statistik deskriptif pada penelitian ini :

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	n		Mean	Median	Std.D Deviation	Min	Max
	Valid	Missing					
Rasio Kemandirian	175	0	18.1473	16.18	9.80872	6.98	72.58
Rasio Efektivitas	175	0	105.2515	104.88	7.24861	87.33	138.29
Pertumbuhan Ekonomi	175	0	5.2385	5.31	0.80797	1.66	6.97
Indeks Pembangunan Manusia	175	0	69.9183	68.87	4.87054	61.81	82.01

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 2)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika :

1. Variabel RK (Rasio Kemandirian) dari total keseluruhan data yang berjumlah 175 data memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18.1473 artinya pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2017 memiliki kemampuan dalam membiayai dan melaksanakan untuk kegiatan pemerintah daerah sendiri adalah kurang. Nilai standar deviasi sebesar 9.80872 dan nilai tengah (median) rasio kemandirian sebesar 16.18 yang terletak pada Kabupaten Purworejo tahun 2016. Untuk nilai terendah (minimum) sebesar 6.98 yang diperoleh Kabupaten Klaten dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 72.58 yang diperoleh Kabupaten Kota Semarang.
2. Variabel RE (Rasio Efektivitas) dari total keseluruhan data yang berjumlah 175 data memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 105.2515 artinya pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2017 memiliki kemampuan dalam merealisasikan PAD yang

direncanakan untuk mencapai target adalah sangat efektif. Nilai standar deviasi sebesar 7.24861 dan nilai tengah (median) pada rasio efektivitas sebesar 104.88 yang terletak Kabupaten Kendal tahun 2014. Untuk nilai terendah (minimum) sebesar 87.33 yang diperoleh Kota Salatiga dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 138.29 juga diperoleh Kota Salatiga.

3. Variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi) dari total keseluruhan data yang berjumlah 175 data memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.2385 artinya rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2017 tumbuh hingga di angka 5.23%. Nilai standar deviasi sebesar 0.80797 dan nilai tengah (median) pertumbuhan ekonomi sebesar 5.31 yang terletak pada Kabupaten Batang tahun 2014. Untuk nilai terendah (minimum) sebesar 1.66 yang diperoleh Kabupaten Cilacap dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 6.97 yang diperoleh Kabupaten Banyumas.
4. Variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari total keseluruhan data yang berjumlah 175 data memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 69.9183 artinya rata-rata kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2017 dikatakan sedang. Nilai standar deviasi sebesar 4.87054 dan nilai tengah (median) indeks pembangunan manusia sebesar 68.87 yang terletak pada Kabupaten Grobogan tahun 2017. Untuk nilai terendah (minimum) sebesar 61.81 yang diperoleh Kabupaten Pemalang dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 82.01 yang diperoleh Kota Semarang.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui hasil dari uji ini maka dilakukan uji *kolmogorov smirnov* dalam program spss dengan kriteria $\alpha = 0.05$ dimana jika signifikan > 0.05 maka variabel terdistribusi normal dan jika < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
n		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.00E+00
	Std. Deviation	0.99134183
Most Extreme Differences	Absolute	0.1
	Positive	0.1
	Negative	-0.05
Kolmogorov-Smirnov Z		1.324
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.06

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov* diatas, dapat dilihat nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.060. Hal ini membuktikan jika signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.060 lebih besar dari 0.05 maka berarti data tersebut terdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam uji ini untuk melihat hasilnya melalui *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) yang mana batas ukuran yaitu *tolerance value* adalah 0.1 dan VIF adalah 10. Jika *tolerance value* ≥ 0.10 atau $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi gejala multikolonieritas (Ghozali, 2013).

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Rasio Kemandirian	0.938	1.066
	Rasio Efektivitas	0.956	1.046
	Pertumbuhan Ekonomi	0.898	1.113

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil keluaran (ouput) yang menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.938 dan VIF sebesar 1.066, variabel rasio efektivitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.956 dan VIF sebesar 1.046, dan rasio pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.898 dan VIF sebesar 1.113. Dari hasil keluaran (output) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, karena hasil dari uji multikolinearitas semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika variabel independen secara statistik menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya > 0.05 , maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2013).

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.494	0.676		0.731	0.466
	Rasio Kemandirian	-0.001	0.005	-0.014	-0.176	0.861
	Rasio Efektivitas	-0.002	0.006	-0.022	-0.288	0.774
	Pertumbuhan Ekonomi	0.096	0.059	0.131	1.639	0.103

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 5)

Berdasarkan hasil dari keluaran (output) yang menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian memiliki signifikansi sebesar 0.861, rasio efektivitas memiliki signifikansi sebesar 0.774, dan pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi sebesar 0.103. Dari hasil keluaran (output) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, karena hasil dari uji heteroskedastisitas semua variabel memiliki nilai signifikansi > 0.05 .

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Analisis Regresi

a. Model I

Pada analisis regresi model I (satu) digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel intervening yaitu pengaruh rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan hasil uji regresi Model I :

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Model I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.506	0.855		2.932	0.004
	Rasio Kemandirian	0.02	0.006	0.242	3.351	0.001
	Rasio Efektivitas	0.023	0.008	0.202	2.795	0.006

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$PE = 2.506 + 0.020RKD + 0.023REK$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 2.506 memberi pengertian jika seluruh variabel independen (rasio kemandirian dan rasio efektivitas) konstan atau

memiliki nilai nol (0), maka besarnya variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) sebesar 2.506.

2. Pada variabel rasio kemandirian memperoleh nilai koefisien sebesar (+) 0.020 menunjukkan bahwa apabila pada variabel rasio kemandirian meningkat sebesar satu-satuan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.020 dengan asumsi variabel independen yang lain dari model regresi dalam kondisi konstan.
3. Pada variabel rasio efektivitas memperoleh nilai koefisien sebesar (+) 0.023 menunjukkan bahwa apabila pada variabel rasio efektivitas meningkat sebesar satu-satuan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.020 dengan asumsi variabel independen yang lain dari model regresi dalam kondisi konstan.

b. Model II

Pada analisis regresi model II (dua) digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel intervening yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Berikut merupakan hasil uji regresi Model II :

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Model II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58.416	2.262		25.823	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	2.196	0.427	0.364	5.144	.000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$IPM = 58.416 + 2.196PE$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 58.416 memberi pengertian jika seluruh variabel independen (pertumbuhan ekonomi) konstan atau memiliki nilai nol (0), maka besarnya variabel dependen (indeks pembangunan manusia) sebesar 58.416.
2. Pada variabel pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai koefisien sebesar (+) 2.196 menunjukkan bahwa apabila pada variabel pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar satu-satuan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 2.196 dengan asumsi variabel independen yang lain dari model regresi dalam kondisi konstan.

4.2.3.2 Uji t

a. Model I

Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh bagaimana pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2013). Jika hasil nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka H_0 gagal ditolak. Namun, jika signifikansi kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif yang digunakan. Berikut merupakan hasil uji statistik t pada model I :

Tabel 4.8 Hasil Uji t Model I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.506	0.855		2.932	0.004
	Rasio Kemandirian	0.02	0.006	0.242	3.351	0.001
	Rasio Efektivitas	0.023	0.008	0.202	2.795	0.006

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Hasil uji statistik t diatas dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi koefisien regresi dari variabel rasio kemandirian. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi rasio kemandirian sebesar 0.020 dan nilai signifikansi sebesar 0.001. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$. Hal ini membuktikan jika rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.

2. Rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi koefisien regresi dari variabel rasio efektivitas. Berdasarkan

hasil perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi rasio efektivitas sebesar 0.023 dan nilai signifikansi sebesar 0.006. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar $0.006 < 0.05$. Hal ini membuktikan jika rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima.

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Model I

Hipotesis	B	Sig.	Kesimpulan
H_1 : Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	0.020	0.001	Didukung
H_2 : Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	0.023	0.006	Didukung

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

b. Model II

Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh bagaimana pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2013). Jika hasil nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka H_0 gagal ditolak. Namun, jika signifikansi kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif yang digunakan. Berikut merupakan hasil uji statistik t pada model II :

Tabel 4.10 Hasil Uji t Model II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58.416	2.262		25.823	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	2.196	0.427	0.364	5.144	.000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 7)

Hasil uji statistik t diatas dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 2.196 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini membuktikan jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sehingga H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima.

Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Model II

Hipotesis	B	Sig.	Kesimpulan
H ₃ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia	2.196	0.000	Didukung

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi

a. Model I

Menurut (Ghozali, 2013) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) terletak diantara 0 dan 1, jika (R^2) semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Berikut merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi model I :

Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi Model I

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.319 ^a	0.102	0.091	0.77028

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 6)

Dari hasil perhitungan diatas bahwa hasil koefisien dari analisis regresi menunjukkan koefisien determinasi atau *adjusted R2* sebesar 0.091 yang sama dengan 9.1%. Angka tersebut bermakna bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio kemandirian dan rasio efektivitas memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 9.1%. Sedangkan sisanya sebesar 90.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

b. Model II

Menurut (Ghozali, 2013) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) terletak diantara 0 dan 1, jika (R^2) semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Berikut merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi model I :

Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi Model II

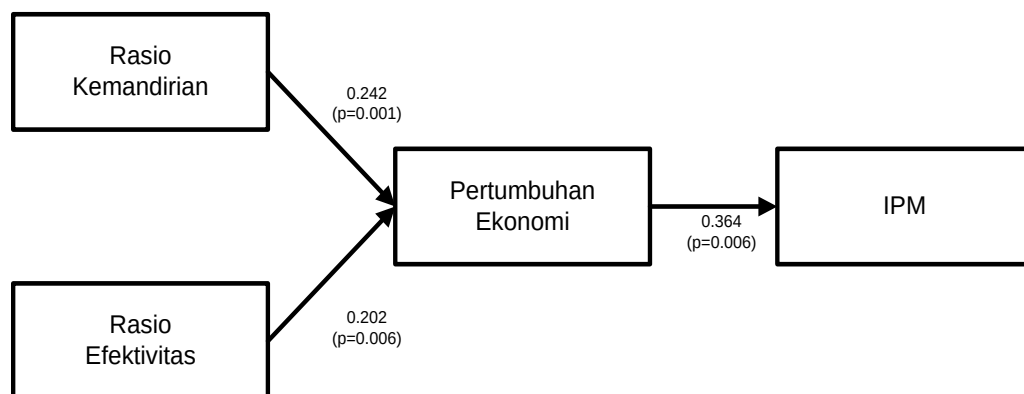
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.364 ^a	0.133	0.128	4.54902

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 7)

Dari hasil perhitungan diatas bahwa hasil koefisien dari analisis regresi menunjukkan koefisien determinasi atau *adjusted R2* sebesar 0.133 yang sama dengan 13.3%. Angka tersebut bermakna bahwa variabel

independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 13.3%. Sedangkan sisanya sebesar 86.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Gambar 4.1 Hasil Analisis Data



4.2.3.4 Uji Sobel Test

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh (Sobel, 1982) dan dikenal dengan uji sobel. Uji sobel berfungsi untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis yang terdapat variabel mediasi.

1. Pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia

Tabel 4.13 Hasil *Sobel Test*

	Input		Test Statistic	Std. Error	<i>p</i> -value
<i>a</i>	0.020	Sobel test :	2.79717662	0.01570155	0.00515513
<i>b</i>	2.196	Aroian test :	2.76066801	0.01590919	0.00576833
<i>S_a</i>	0.006	Goodman test :	2.83517306	0.01549112	0.00458009
<i>S_b</i>	0.427				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 8)

Dari hasil uji sobel diatas terlihat bahwa *p*-value untuk hubungan rasio kemandirian dan indeks pembangunan manusia dengan mediasi pertumbuhan ekonomi memiliki hasil sebesar 0.00515513. Dari hasil tersebut membuktikan jika *p*-value sebesar $0.00515513 < 0.05$ maka pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia dan berpengaruh positif signifikan.

2. Pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia

Tabel 4.14 Hasil Sobel Test

	Input		Test Statistic	Std. Error	<i>p</i> -value
<i>a</i>	0.023	Sobel test :	2.50949421	0.02012676	0.01209042
<i>b</i>	2.196	Aroian test :	2.47411218	0.0204146	0.01335677
<i>S_a</i>	0.008	Goodman test :	2.54643898	0.01983476	0.01088282
<i>S_b</i>	0.427				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran 8)

Dari hasil uji sobel diatas terlihat bahwa *p*-value untuk hubungan rasio efektivitas dan indeks pembangunan manusia dengan mediasi pertumbuhan ekonomi memiliki hasil sebesar 0.01209042. Dari hasil tersebut membuktikan jika *p*-value sebesar $0.01209042 < 0.05$ maka pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia dan berpengaruh positif signifikan.

Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Uji Sobel Test

Hipotesis	<i>p</i> -value	Kesimpulan
H ₄ : Pertumbuhan Ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia	0.00515513	Didukung

H ₅ : Pertumbuhan Ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia	0.01209042	Didukung
---	------------	----------

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Besar nilai p -value adalah 0.001 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.001 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah dapat meningkatkan PAD dan itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah tersebut di harapkan mampu untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah. Tidak hanya itu dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Jika daerah tersebut tidak mampu untuk menerapkan desentralisasi fiskal yaitu berupa pelimpahan wewenang dari pusat maka daerah tersebut akan tertinggal dan menyebabkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah jika dalam masing-masing daerah dapat mandiri dalam mengelola daerahnya maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuana, 2014) dan (Saiful, 2011) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan rasio tersebut memiliki peranan yang signifikan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio kemandirian akan meningkatkan PAD yang tinggi pada daerah tersebut dan hal itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

4.3.2 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa efektivitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Besar nilai p -value adalah 0.006 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.006 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa keefektifan daerah dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran dan pengelolaan potensi yang ada pada daerah tersebut dan juga memberikan pelayanan masyarakat yang optimal maka akan dapat mengembangkan perekonomian.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah

mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan. Jika pemerintah daerah berhasil mencapai target yang telah di rencanakan dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Impikasi dalam penelitian ini adalah jika keefektifan dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas pemerintahan meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Syamsudin, 2015) dan (Astuti, 2015) yang membuktikan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio efektivitas memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada daerah.

4.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Besar nilai p -value adalah 0.000 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.000 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang baik

juga dan hal itu akan mempengaruhi pembangunan manusia di daerah tersebut.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Jika semua itu sudah dapat di lakukan oleh pemerintah daerah maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Dalam peningkatan perekonomian juga akan mempengaruhi pembangunan manusia, ketika pendapatan atau PDB per kapita meningkat berarti pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan manusia menjadi naik (Prasetyo, 2013). Implikasi pada penelitian ini adalah jika pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulana & Bowo, 2013) dan (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2014) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan manusia.

4.3.4 Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan di mediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Besar nilai p -value adalah 0.00515513 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.00515513 < 0.05$.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada daerah membuat pemerintah daerah dituntut untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Jika pemerintah dapat atau berhasil menjalankan pemerintahan daerahnya dengan baik maka akan berdampak pada laju perekonomian yang meningkat. Hal itu akan berlanjut dampaknya terhadap kualitas manusia atau masyarakat di daerah tersebut di mana indeks pembangunan manusia di daerah tersebut juga akan meningkat (Ramadhani, 2016). Karena dengan meningkatnya perekonomian di daerah tersebut maka akan dapat terus meningkatkan infrastruktur guna pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan ke masyarakat dengan optimal seperti meningkatkan mutu kualitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Implikasi pada penelitian ini adalah jika pemerintah dapat mengelola daerahnya dengan sendiri maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan itu akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Amalia & Purbadharmaja, 2014) dan (Saiful, 2011) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan dengan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak pada indeks pembangunan manusia yang mana daerah tersebut akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan keuangannya sendiri sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

4.3.5 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi

Pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan di mediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Besar nilai p -value adalah 0.01209042 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari p -value tersebut signifikan karena $0.01209042 < 0.05$.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah

mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan. Jika pemerintah daerah berhasil mencapai target yang telah di rencanakan dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan meningkatnya perekonomian di daerah tersebut maka akan dapat terus meningkatkan infrastruktur guna pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan ke masyarakat dengan optimal seperti meningkatkan mutu kualitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Ramadhani, 2016). Implikasi pada penelitian ini adalah jika keefektifan dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas pemerintahan meningkat maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan itu akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Berliani, 2016) dan (Astuti, 2015) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh dan berdampak pada kesejahteraan manusia atau masyarakat. Dalam indikator kinerja keuangan tersebut di antaranya adalah rasio efektivitas keuangan daerah. Dimana rasio efektivitas memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada daerah dan itu akan berdampak pada kesejahteraan manusia atau masyarakat pada daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan berdasarkan variabel rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia dengan dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kemandirian untuk melakukan seluruh aktivitas pemerintah di daerah tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
2. Rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat keefektifan pemerintah dalam mengelola daerahnya maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan berpengaruh

terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

4. Pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kemandirian untuk melakukan seluruh aktivitas pemerintah di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang otomatis berdampak ke seluruh kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.
5. Pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat keefektifan pemerintah dalam mengelola daerahnya maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang otomatis berdampak ke seluruh kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut saran untuk penelitian yang selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan tahun penelitian dan memperluas populasi dengan memilih kabupaten/kota yang di Indonesia.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel lainnya pada variabel independen seperti rasio desentralisasi fiskal ataupun rasio efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, P. 2013.”Analisis faktor yang mempengaruhi kemungkinan financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI periode 2008-2011.” *Jurnal Akuntansi*. 2(4), 23-29.
- Algifari. 2014. *Hubungan Antara Pendapatan per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Amalia dan Purbadharmaja. 2014. “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keresasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 3(5), 65-69.
- Ardi. 2018. *Analisis kemandirian keuangan daerah*. Inovasi. 13. 92. 10.29264/jinv.v13i2.2461.
- Astuti, R. 2015. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(BEI).” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 8(3), 42-45.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti & Gede. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan.” *Jurnal Manajemen Unud*, 5(4), 84-92.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140.
- Inpres No.7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Iskandar. (2013). *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kasmir, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Maulana dan Bowo. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi Di Indonesia 2007-2011." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 4(3), 14–20.
- Nordiawan, D dan Ayuningtyas, H. 2011. *Akuntansi Sektor Publik (2ed)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasal 239 Permendagri No.13 Tahun 2006, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Prasetyo. 2013. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Rahmawati, N. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*.
- Ramadhani, R. 2016. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 14(1),29-41.
- Ronald & Sarmiyatiningsih. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 20(1), 34-37.
- Saiful. 2011. "Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2006-2008." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 4-5.
- Shah, A and Thompson, T. 2002. *Implementing Dezentralized Local Governance : A Teacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures, Prepared for "Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?" A Conference Sponsored by The International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State, University, Atlanta*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syamsudin, (2015). “Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 17(1), 15–27.
- Todaro. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- UNDP. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.
- Yuana, A. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Periode 2013-2017

No	Wilayah
1	Kabupaten Cilacap
2	Kabupaten Banyumas
3	Kabupaten Purbalingga
4	Kabupaten Banjarnegara
5	Kabupaten Kebumen
6	Kabupaten Purworejo
7	Kabupaten Wonosobo
8	Kabupaten Magelang
9	Kabupaten Boyolali
10	Kabupaten Klaten
11	Kabupaten Sukoharjo
12	Kabupaten Wonogiri
13	Kabupaten Karanganyar
14	Kabupaten Sragen
15	Kabupaten Grobogan
16	Kabupaten Blora
17	Kabupaten Rembang

18	Kabupaten Pati
19	Kabupaten Kudus
20	Kabupaten Jepara
21	Kabupaten Demak
22	Kabupaten Semarang
23	Kabupaten Temanggung
24	Kabupaten Kendal
25	Kabupaten Batang
26	Kabupaten Pekalongan
27	Kabupaten Pemalang
28	Kabupaten Tegal
29	Kabupaten Brebes
30	Kota Magelang
31	Kota Surakarta
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Pekalongan
35	Kota Tegal

Rasio Kemandirian Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Periode 2013-2017

No	Wilayah JATENG	Rasio Kemandirian (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab Cilacap	13.20	14.52	17.01	17.81	16.13
2	Kab Banyumas	16.72	21.00	23.17	23.73	21.59
3	Kab Purbalingga	11.55	17.47	17.91	17.21	17.32
4	Kab Banjarnegara	8.40	10.82	13.27	13.27	11.27
5	Kab Kebumen	8.93	9.87	12.91	13.35	15.19
6	Kab Purworejo	11.68	13.43	16.41	16.18	15.99
7	Kab Wonosobo	9.31	12.62	15.14	12.21	14.40
8	Kab Magelang	11.93	12.13	17.06	17.85	20.70
9	Kab Boyolali	13.83	16.06	18.67	15.10	16.70
10	Kab Klaten	6.98	7.89	11.84	10.34	11.36
11	Kab Sukoharjo	17.18	18.50	24.28	22.49	20.21
12	Kab Wonogiri	8.09	12.12	13.79	12.94	11.33
13	Kab Karanganyar	13.11	14.53	16.98	13.24	18.47
14	Kab Sragen	10.22	12.38	16.20	12.56	16.10
15	Kab Grobogan	9.12	14.68	16.28	14.54	16.96
16	Kab Blora	8.22	11.37	11.70	15.78	12.64
17	Kab Rembang	14.00	16.14	19.59	16.50	17.67
18	Kab Pati	11.62	13.86	17.71	17.13	15.41

19	Kab Kudus	13.97	15.56	20.88	20.60	19.54
20	Kab Jepara	11.03	16.10	16.36	15.80	17.77
21	Kab Demak	11.13	16.16	18.97	19.20	18.07
22	Kab Semarang	17.88	20.47	22.60	21.81	21.87
23	Kab Temanggung	11.04	12.10	16.12	16.11	18.37
24	Kab Kendal	11.00	15.06	15.73	13.48	18.91
25	Kab Batang	10.91	13.21	17.61	15.50	16.87
26	Kab Pekalongan	13.48	14.87	20.80	17.76	19.58
27	Kab Pemalang	8.67	10.07	14.75	17.22	14.24
28	Kab Tegal	11.00	14.62	19.13	18.35	17.58
29	Kab Brebes	8.19	10.96	16.95	14.71	17.97
30	Kota Magelang	16.50	18.03	22.91	23.55	27.63
31	Kota Surakarta	34.91	35.03	40.60	28.60	38.47
32	Kota Salatiga	14.69	18.33	20.35	20.24	21.96
33	Kota Semarang	56.04	60.24	72.58	61.35	69.22
34	Kota Pekalongan	16.34	19.79	25.85	23.81	27.45
35	Kota Tegal	28.87	29.71	36.09	31.48	31.40

Kriteria Rasio Kemandirian Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

Tengah

Periode 2013-2017

Wilayah JATENG	Rasio Kemandirian (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Cilacap	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Banyumas	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kab Purbalingga	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Banjarnegara	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Kebumen	Sangat Kurang	Sedang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Purworejo	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Wonosobo	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Magelang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang
Kab Boyolali	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Klaten	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Sukoharjo	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang

Kab Wonogiri	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Karanganyar	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Sragen	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Grobogan	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Blora	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Rembang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Pati	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Kudus	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Kurang
Kab Jepara	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Demak	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Semarang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kab Temanggung	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Kendal	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Batang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Pekalongan	Kurang	Kurang	Sedang	Kurang	Kurang
Kab Pemalang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang

Kab Tegal	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kab Brebes	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Kota Magelang	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Surakarta	Cukup	Cukup	Baik	Sedang	Cukup
Kota Salatiga	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Semarang	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Kota Pekalongan	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Tegal	Sedang	Sedang	Cukup	Cukup	Cukup

Rasio Efektivitas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Periode 2013-2017

No	Wilayah JATENG	Rasio Efektivitas (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab Cilacap	110.25	96.97	100.40	130.89	103.66
2	Kab Banyumas	100.97	103.74	107.41	108.78	107.54
3	Kab Purbalingga	102.93	104.73	109.09	102.49	108.60
4	Kab Banjarnegara	99.61	100.77	105.44	107.15	108.23
5	Kab Kebumen	110.39	105.13	100.30	112.69	101.46
6	Kab Purworejo	102.86	106.24	109.59	87.38	99.47
7	Kab Wonosobo	99.72	104.53	105.50	108.58	110.41
8	Kab Magelang	100.96	102.56	107.90	111.43	107.38
9	Kab Boyolali	106.63	107.26	107.07	104.78	105.87
10	Kab Klaten	103.52	102.90	101.91	111.86	109.42
11	Kab Sukoharjo	100.04	101.48	104.46	100.94	100.00
12	Kab Wonogiri	105.78	103.30	105.58	109.44	104.66
13	Kab Karanganyar	103.74	107.09	99.95	107.26	97.15
14	Kab Sragen	105.73	104.42	97.63	106.59	94.69
15	Kab Grobogan	109.53	102.55	106.83	117.68	100.61
16	Kab Blora	109.91	113.63	104.03	122.10	101.81
17	Kab Rembang	108.94	103.98	101.11	116.23	99.34
18	Kab Pati	107.90	101.13	96.90	109.02	101.25

19	Kab Kudus	116.24	109.45	100.47	112.85	96.01
20	Kab Jepara	96.24	107.03	100.84	107.32	100.40
21	Kab Demak	103.52	97.32	93.45	103.27	95.24
22	Kab Semarang	89.12	89.71	101.32	111.50	99.00
23	Kab Temanggung	102.55	103.84	107.10	114.57	109.74
24	Kab Kendal	107.34	104.88	102.10	110.00	104.06
25	Kab Batang	106.04	97.82	98.14	114.47	107.71
26	Kab Pekalongan	103.66	104.71	107.6	109.24	115.03
27	Kab Pemasang	100.67	111.43	104.41	91.74	100.22
28	Kab Tegal	104.90	110.36	106.76	112.51	109.73
29	Kab Brebes	123.13	118.77	104.52	108.65	103.82
30	Kota Magelang	99.39	103.69	96.94	104.72	104.48
31	Kota Surakarta	111.04	107.31	99.94	114.29	106.11
32	Kota Salatiga	87.33	106.60	93.80	138.29	97.30
33	Kota Semarang	95.58	89.25	96.12	104.94	96.27
34	Kota Pekalongan	100.44	102.36	107.68	111.28	108.46
35	Kota Tegal	99.51	88.44	102.31	108.99	97.87

Kriteria Rasio Efektivitas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Periode 2013-2017

Wilayah JATENG	Rasio Efektivitas (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Cilacap	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Banyumas	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Purbalingga	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Banjarnegara	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Kebumen	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Purworejo	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Efektif
Kab Wonosobo	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Magelang	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Boyolali	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Kab Klaten	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Sukoharjo	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Wonogiri	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Karanganyar	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kab Sragen	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kab Grobogan	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Blora	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Rembang	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kab Pati	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Kudus	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kab Jepara	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Kab Demak	Sangat Efektif	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kab Semarang	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kab Temanggung	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Kendal	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Batang	Sangat Efektif	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Pekalongan	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Pemalang	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif
Kab Tegal	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kab Brebes	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Magelang	Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Surakarta	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Kota Salatiga	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kota Semarang	Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kota Pekalongan	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Tegal	Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Periode 2013-2017

No	Wilayah JATENG	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab Cilacap	1.66	2.92	5.94	5.06	2.45
2	Kab Banyumas	6.97	5.67	6.12	6.05	6.34
3	Kab Purbalingga	5.27	4.85	5.43	4.75	5.12
4	Kab Banjarnegara	5.44	5.31	5.47	5.41	5.42
5	Kab Kebumen	4.57	5.79	6.28	4.97	4.89
6	Kab Purworejo	4.94	4.48	5.37	5.15	5.14
7	Kab Wonosobo	4.00	4.78	4.85	5.25	3.16
8	Kab Magelang	5.91	5.38	5.03	5.40	5.06
9	Kab Boyolali	5.83	5.42	5.91	5.27	5.52
10	Kab Klaten	5.96	5.84	5.30	5.14	5.07
11	Kab Sukoharjo	5.78	5.40	5.69	5.67	5.72
12	Kab Wonogiri	4.78	5.26	5.40	5.22	5.17
13	Kab Karanganyar	5.69	5.22	5.05	5.37	5.52
14	Kab Sragen	6.70	5.59	6.05	5.72	5.81
15	Kab Grobogan	4.57	4.07	5.96	4.46	5.65
16	Kab Blora	5.36	4.39	5.36	6.53	5.84
17	Kab Rembang	5.43	5.15	5.50	5.23	6.18
18	Kab Pati	5.97	4.64	5.94	5.20	5.40

19	Kab Kudus	4.36	4.43	3.90	2.42	2.97
20	Kab Jepara	5.39	4.81	5.04	5.02	5.13
21	Kab Demak	5.27	4.29	5.93	5.04	5.56
22	Kab Semarang	5.97	5.85	5.52	5.27	5.47
23	Kab Temanggung	5.20	5.03	5.21	5.00	4.68
24	Kab Kendal	6.22	5.14	5.25	5.60	5.57
25	Kab Batang	5.88	5.31	5.42	4.93	5.29
26	Kab Pekalongan	5.99	4.95	4.78	5.16	5.28
27	Kab Pemalang	5.57	5.52	5.58	5.38	5.39
28	Kab Tegal	6.73	5.03	5.45	6.37	5.38
29	Kab Brebes	5.91	5.30	5.98	4.87	5.47
30	Kota Magelang	6.04	4.98	5.11	5.17	5.18
31	Kota Surakarta	6.25	5.28	5.44	5.32	5.33
32	Kota Salatiga	6.30	5.57	5.17	5.23	5.21
33	Kota Semarang	6.25	6.31	5.80	5.69	5.64
34	Kota Pekalongan	5.91	5.48	5.00	5.36	5.32
35	Kota Tegal	5.67	5.04	5.45	5.46	5.46

Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa**Tengah****Periode 2013-2017**

No	Wilayah JATENG	Indeks Pembangunan Manusia				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab Cilacap	66.80	67.25	67.77	68.60	68.90
2	Kab Banyumas	68.55	69.25	69.89	70.49	70.75
3	Kab Purbalingga	65.53	66.23	67.03	67.48	67.72
4	Kab Banjarnegara	62.84	63.15	64.73	65.52	65.86
5	Kab Kebumen	64.86	65.67	66.87	67.41	68.29
6	Kab Purworejo	69.77	70.12	70.37	70.66	71.31
7	Kab Wonosobo	64.57	65.20	65.70	66.19	66.89
8	Kab Magelang	65.86	66.35	67.13	67.85	68.39
9	Kab Boyolali	69.81	70.34	71.74	72.18	72.64
10	Kab Klaten	72.42	73.19	73.81	73.97	74.25
11	Kab Sukoharjo	73.22	73.76	74.53	75.06	75.56
12	Kab Wonogiri	66.40	66.77	67.76	68.23	68.66
13	Kab Karanganyar	73.33	73.89	74.26	74.90	75.22
14	Kab Sragen	69.95	70.52	71.10	71.43	72.40
15	Kab Grobogan	67.43	67.77	68.05	68.52	68.87
16	Kab Blora	65.37	65.84	66.22	66.61	67.52
17	Kab Rembang	66.84	67.40	68.18	68.60	68.95

18	Kab Pati	66.47	66.99	68.51	69.03	70.12
19	Kab Kudus	71.58	72.00	72.72	72.94	73.84
20	Kab Jepara	69.11	69.61	70.02	70.25	70.79
21	Kab Demak	68.38	68.94	69.75	70.10	70.41
22	Kab Semarang	71.29	71.65	71.89	72.40	73.20
23	Kab Temanggung	65.52	65.97	67.07	67.60	68.34
24	Kab Kendal	67.98	68.46	69.57	70.11	70.62
25	Kab Batang	63.60	64.07	65.46	66.38	67.35
26	Kab Pekalongan	66.26	66.98	67.40	67.71	68.40
27	Kab Pemasang	61.81	62.35	63.70	64.17	65.04
28	Kab Tegal	63.50	64.10	65.04	65.84	66.44
29	Kab Brebes	61.87	62.55	63.18	63.98	64.86
30	Kota Magelang	75.29	75.79	76.39	77.16	77.84
31	Kota Surakarta	78.89	79.34	80.14	80.76	80.85
32	Kota Salatiga	79.37	79.98	80.96	81.14	81.68
33	Kota Semarang	78.68	79.24	80.23	81.19	82.01
34	Kota Pekalongan	70.82	71.53	72.69	73.32	73.77
35	Kota Tegal	71.44	72.20	72.96	73.55	73.95

LAMPIRAN 2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistics

	n		Mean	Median	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing					
RK	175	0	18.1473	16.18	9.80872	6.98	72.58
RE	175	0	105.2515	104.88	7.24861	87.33	138.29
PE	175	0	5.2385	5.31	0.80797	1.66	6.97
IPM	175	0	69.9183	68.87	4.87054	61.81	82.01

LAMPIRAN 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
n		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.99134183
	Absolute	.100
Most Extreme Differences	Positive	.100
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		1.324
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	55.550	4.315		12.874	.000		
	RK	.267	.030	.537	8.802	.000	.938	1.066
	RE	.023	.041	.034	.569	.570	.956	1.046
	PE	1.355	.376	.225	3.608	.000	.898	1.113

a. Dependent Variable: IPM

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.494	.676		.731	.466
1 RK	-.001	.005	-.014	-.176	.861
1 RE	-.002	.006	-.022	-.288	.774
1 PE	.096	.059	.131	1.639	.103

a. Dependent Variable: abs_res

LAMPIRAN 6

Hasil Regresi Model I

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.319 ^a	.102	.091	.77028

a. Predictors: (Constant), RE, RK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.506	.855		2.932	.004
	RK	.020	.006	.242	3.351	.001
	RE	.023	.008	.202	2.795	.006

a. Dependent Variable: PE

LAMPIRAN 7

Hasil Regresi Model II

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.364 ^a	.133	.128	4.54902

a. Predictors: (Constant), PE

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58.416	2.262		25.823	.000
1 PE	2.196	.427	.364	5.144	.000

a. Dependent Variable: IPM

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Sobel Tes

RASIO KEMANDIRIAN → PERTUMBUHAN EKONOMI → IPM

	Input		Test Statistic	Std. Error	<i>p</i> -value
<i>a</i>	0.020	Sobel test :	2.79717662	0.01570155	0.00515513
<i>b</i>	2.196	Aroian test :	2.76066801	0.01590919	0.00576833
<i>S_a</i>	0.006	Goodman test :	2.83517306	0.01549112	0.00458009
<i>S_b</i>	0.427				

RASIO EFEKTIVITAS → PERTUMBUHAN EKONOMI → IPM

	Input		Test Statistic	Std. Error	<i>p</i> -value
<i>a</i>	0.023	Sobel test :	2.50949421	0.02012676	0.01209042
<i>b</i>	2.196	Aroian test :	2.47411218	0.0204146	0.01335677
<i>S_a</i>	0.008	Goodman test :	2.54643898	0.01983476	0.01088282
<i>S_b</i>	0.427				